

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Audit Terhadap Tranparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pada LKPP Tahun 2019-2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan pemerintah terkait utang negara yang dilaporkan di LKPP belum maksimal. Hal ini didasari oleh: Pertama, belum berjalan efektifnya strategi yang dirancang pemerintah terkait pengelolaan utang, baik strategi pengelolaan utang jangka menengah (lima tahunan) dan strategi pengelolaan utang tahunan. Kedua, tidak tercapainya ketiga indikator yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah yaitu, kemampuan pembentukan modal atau kekayaan bersih negara setiap tahun, pemanfaatan penerimaan utang untuk tujuan produktif, dan kemampuan pendapatan APBN melunasi kewajiban cicilan utang dan bunga. Sehingga dapat dilihat secara keseluruhan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola utang negara belum maksimal.
2. Terkait transparansi pemerintah dalam pengelolaan utang yang dilaporkan di LKPP sudah baik. Hal ini didasari oleh tercapainya ketiga indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan utang. Walaupun untuk aspek keterbukaan terkait SBN dan pengalokasian utang belum terpenuhi. Hal ini didasari oleh: Pertama, seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai utang dalam negeri sehingga menimbulkan bias

di masyarakat. Kedua, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara data yang dilaporkan oleh pemerintah di dalam LKPP dengan data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Ketiga, pada LKPP penyajian anggaran pembiayaan penerimaan surat utang dengan pelunasan surat utang dalam satu tahun anggaran pada APBN disajikan secara neto. Penyajian anggaran pembiayaan yang berasal dari surat secara neto tidak menggambarkan anggaran pengeluaran APBN yang digunakan untuk pelunasan surat utang yang jatuh tempo. Demikian juga proses penganggaran penambahan utang baru dari penerbitan surat utang tidak dinilai kelayakan sesuai kebutuhan pendanaan karena tidak disajikan anggarannya secara terpisah. Keempat, pemerintah tidak memaparkan secara jelas terkait pos-pos mana yang defisitnya ditanggulangi oleh penerimaan pinjaman.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya terfokus pada salah satu komponen fiskal yang terdapat di LKPP yaitu utang.
2. Masih sedikitnya penelitian yang membahas topik terkait pengelolaan keuangan dan transparansi keuangan pemerintah.
3. Penelitian ini hanya menganalisis data sekunder, sehingga belum bisa mencerminkan dan membandingkan dengan kondisi lapangan.
4. Periode penelitian hanya terbatas dari tahun 2019-2022.

### 5.3 Saran Penelitian

1. Peneliti selanjutnya agar dapat menganalisis terkait komponen fiskal lainnya. Baik berupa komponen penerimaan yang terdiri dari pajak dan bukan pajak atau komponen pengeluaran pemerintah.
2. Melakukan penelitian dengan topik yang sama agar memperbanyak referensi terkait pengelolaan dan transparansi keuangan pemerintah.
3. Menambah data berupa data primer, baik itu wawancara ataupun pembagian kuesioner kepada aparatur sipil negara yang bertanggung jawab terkait pengelolaan keuangan pemerintah.
4. Menambah periode penelitian ke tahun 2023 dan tahun 2024, karena pada tahun tersebut belanja utang memiliki komposisi paling besar diantara belanja pemerintah lainnya.

